

Pemprov Kaltim Perketat Program OPD

Sumber: KORAN KALTIM Selasa, 02/12/2025

Samarinda – Menghadapi pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, Pemprov Kaltim mulai memperketat berbagai program di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pada 2026 mendatang, APBD Kaltim dari pemerintah pusat hanya sebesar Rp15 triliun, turun drastis setelah adanya pemangkasan sekitar Rp6 triliun. Padahal, pada 2025 Kaltim menerima APBD sebesar Rp21 triliun.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menjelaskan setelah anggaran 2026 disahkan, Pemprov Kaltim akan melakukan efisiensi pada sejumlah belanja yang dinilai tidak terlalu mendesak. "Mulai dari kegiatan makan minum hingga perjalan dinas setiap OPD akan dirampingkan," ujar Rudy Mas'ud, Senin (1/12). Dia menyebut, perampingan belanja tersebut dilakukan hingga mencapai 66 persen. Karena itu, seluruh kegiatan OPD di lingkungan Pemprov Kaltim otomatis diperketat dan disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang tersedia. "Jadi apabila ada hal-hal yang belum terakomodasi, mohon dimaafkan," ucapnya.

Meski demikian, Rudy memastikan pengetatan anggaran tidak akan mengganggu pemenuhan standar pelayanan minimum kepada masyarakat Kaltim. Beberapa program prioritas bahkan akan tetap ditingkatkan. "Mulai dari program pendidikan dan kesehatan," sebutnya. Rudy juga memastikan, Program Gratispol tetap berjalan. Pada tahun depan, Pemprov Kaltim menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp2 triliun untuk program tersebut.

"Selain itu, infrastruktur pelayanan dasar juga kami dorong dan tetap dimaksimalkan mulai tahun ini. Selebihnya, program-program lainnya (yang tidak terlalu penting) akan tetap kita pangkas," tegasnya. Rudy menambahkan, pembahasan APBD untuk tahun depan memerlukan waktu lebih panjang karena pemerintah harus kembali meneliti secara detail struktur anggarannya. Terutama terkait perhitungan pendapatan daerah. "Persoalannya ada pada pendapatan yang harus dihitung ulang oleh tim anggaran. Kami melakukan penyisiran kembali hingga akhirnya menetapkan angka Rp15 triliun," ujarnya.

Meski demikian, Gubernur Kaltim tersebut tetap yakin pembangunan daerah akan tetap berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Bahkan walaupun adanya pemangkasan APBD tidak akan berdampak terhadap pelayanan terhadap masyarakat. **(su/sh/ga)**

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Pemprov Kaltim Perketat Program OPD, 02/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 141 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
 - (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh pemerintah.
2. Pasal 143 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan standar harga dan analisis standar belanja.
3. Pasal 144 UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
 - (1) belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
 - (2) Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).